



bagian hukum

kompleks perkantoran 75576 082256703151

<https://jdih.kutaibaratkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / bagian hukum

Pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati / SEKDA / Intruksi Bupati

No. SK :

Persyaratan

1. Telaahan Staf dari pemohon yang ditandatangani oleh kepala Instansi yang bersangkutan.
2. File elektronik draf Surat Keputusan (SK)
3. Hardcopy draf Surat Keputusan (SK)
4. Map warna merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perangkat Daerah/Pemohon membawa berkas permohonan seperti pada persyaratan.
2. Kepala Sub bagian Hukum dan Perundang-undangan menelaah dan mengkaji draft Surat Keputusan Bupati
3. Menyampaikan hasil penelaahan dan pengkajian draft Surat Keputusan Bupati Kepada Kepala Bagian Hukum.
4. Kepala Bagian Hukum Menerima dan memeriksa Draft Surat Keputusan Bupati. Jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki. Jika disetujui memberikan paraf dan disampaikan kepada OPD Pemrakarsa untuk sinkronisasi.
5. Menyampaikan draft Surat Keputusan Bupati kepada Asisten yang membidangi untuk mendapatkan saran dan masukan dan atau persetujuan.
6. Menerima dan memeriksa Draft Surat Keputusan Bupati. Jika tidak setuju dikembalikan ke Bagian Hukum untuk diperbaiki. Jika disetujui memberikan paraf persetujuan.
7. Menerima dan memeriksa Draft Surat Keputusan Bupati Jika tidak disetujui dikembalikan ke Sekda untuk diperbaiki Jika disetujui maka dilakukan penandatanganan
8. Memberikan nomor dan tanggal penetapan Surat Keputusan Bupati
9. Menerima penyerahan Surat Keputusan Bupati dengan Tanda Terima

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



bagian hukum

kompleks perkantoran 75576 082256703151

<https://jdih.kutaibaratkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / bagian hukum

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) Bupati / SEKDA / Intruksi Bupati

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0821 5147 8777
2. Telepon : 0821 5147 8777